



# DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN PENDIDIK NUSANTARA (IPN)

## LAPORAN SINGKAT

### Hasil Pertemuan DPP Ikatan Pendidik Nusantara

**Hari/Tanggal** : Senin–Selasa, 22–23 Desember 2025

**Tempat** : Jakarta

### Peserta Pertemuan

1. Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Pendidik Nusantara
2. Deputi Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB (Pak Raka dan Pak Bakti)
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Bidang Unit Layanan)
4. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensesneg

### A. Latar Belakang

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan komunikasi dan koordinasi antara DPP Ikatan Pendidik Nusantara dengan kementerian terkait dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian serta pengembangan sumber daya guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, serta membawa aspirasi anggota IPN tentang persoalan di daerah.

### B. Pokok Pembahasan

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal utama, antara lain:

1. Isu-isu strategis terkait kebijakan kepegawaian guru dan tenaga kependidikan.
2. Penguatan sistem pengembangan kompetensi dan profesionalisme pendidik.
3. Sinkronisasi kebijakan antara Kementerian PANRB dan Kemendikdasmen dalam pengelolaan SDM pendidikan.
4. Aspirasi dan masukan dari Ikatan Pendidik Nusantara terkait kondisi dan tantangan pendidik di berbagai daerah.
5. Follow-up Surat Permohonan Audiensi IPN dengan Kemensesneg, dalam upaya menyampaikan aspirasi kepada Presiden RI Bapak H. Prabowo Subianto

### C. Hasil Pertemuan

1. Terbangunnya kesepahaman awal mengenai pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara DPP Ikatan Pendidik Nusantara dengan Kementerian PANRB dan Kemendikdasmen.
2. Komitmen untuk menindaklanjuti masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh Ikatan Pendidik Nusantara sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
3. Usulan IPN untuk peralihan Guru PPPK menjadi PNS sudah masuk pembahasan di Deputi SDM Kemendikdasmen.
4. Terkait wacana perekrutan kembali guru PPPK, masih belum ada regulasi. Pemerintah terus berupaya untuk penuntasan guru yang sudah masuk Dapodik dan memiliki sertifikat pendidik.
5. Untuk R4 yang telah dilantik dengan gaji yang dikuar ekspetasi, IPN telah mengajukan peninjauan kelayakan gaji agar guru mendapatkan kesejahteraan yang layak.
6. Kesepakatan untuk membuka ruang komunikasi dan koordinasi lanjutan guna mendukung perumusan dan implementasi kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Dalam upaya memperjuangkan hak-hak dan kepentingan para guru dan tenaga kependidikan,

Sekretariat: Kartika Residence blok B3 RT 029/RW 008 Desa Gintungkerta Kec. Klari  
Kabupaten Karawang Kode Pos 41371 Email: [ikatanpendidiknusantara@gmail.com](mailto:ikatanpendidiknusantara@gmail.com)  
Telp/HP: 082191300626, 082255582239, 088808900422FB: Ipentara Ok



## DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN PENDIDIK NUSANTARA (IPN)

kami mengajukan permohonan audiensi dengan Bapak/Ibu Menteri Sekretariat Negara untuk membahas aspirasi dan tuntutan kami terkait peralihan status PPPK ke PNS.

### D. Tuntutan Permohonan IPN:

Agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk:

1. Mengubah status PPPK menjadi PNS bagi guru dan tenaga kependidikan melalui Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN khususnya bagi Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Memohon agar Presiden memberikan kewenangan khusus kepada Kemendikdasmen agar guru dan tenaga kependidikan dikelola khusus oleh Kemendikdasmen, karena tugas pokok fungsi yg sama.
3. Memberikan hak jaminan sosial yang sama serta layak bagi guru dan tenaga kependidikan.
4. Memberikan perlindungan hukum khususnya kesejahteraan yang standart UM dan karir bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan yayasan atau yang disebut swasta, karena sama-sama mendidik anak bangsa dan agar tidak ada kesenjangan antara lembaga negeri dan swasta
5. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga profesional di lingkungan pendidikan

### E. Penutup

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam memperkuat sinergi antara organisasi profesi pendidik dan pemerintah, demi terwujudnya sistem kepegawaian dan pengembangan SDM pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Demikian laporan singkat ini disusun sebagai dokumentasi kegiatan DPP Ikatan Pendidik Nusantara.

Karawang, 24 Desember 2025

### DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN PENDIDIK NUSANTARA (IPN)

Ketua Umum;

HASNA, S. Pd., Gr.

Sekretaris Jenderal;

STEPANUS, S. Pd., Gr.